

AKHLAK DAN KEMAJUAN BANGSA

Oleh Nurcholish Madjid

Para ulama gemar memperingatkan bahwa kejayaan suatu bangsa tergantung kepada keteguhan akhlak, budi pekerti, atau moral bangsa itu. Biasanya peringatan itu dikaitkan dengan adagium berbentuk syair Arab, yang artinya, “Sesungguhnya bangsa-bangsa itu tegak selama akhlaknya tegak; dan jika akhlaknya runtuh, maka runtuh pulalah bangsa-bangsa itu”.

Tidak ada bukti kebenaran adagium itu yang lebih demonstratif daripada apa yang kita saksikan di zaman modern jika pengertian akhlak yang amat luas kita batasi hanya kepada pengertian etika sosial, maka sudah merupakan pendapat para pakar ilmu-ilmu sosial bahwa bangsa yang kuat (dan maju) inilah bangsa yang etikanya tegar, tidak lemah. Amerika Serikat, misalnya, adalah bangsa yang dalam etika sosialnya tegar, sehingga tidak menolerir bentuk penyelewengan apa pun yang dilakukan warga negara, apalagi pejabat yang akan banyak mempengaruhi publik. Maka kita catat, misalnya, Gary Hart, seorang bakal calon presiden yang amat cerah dan memberi harapan, jatuh tak tertolong hanya karena di suatu malam Minggu, ketika istrinya pulang mudik ke Denver, Colorado, flatnya di Washington terlihat dimasuki seorang wanita, yang ternyata, foto model dari Miami, Florida, bernama Donna Rice. Usut punya usut, ternyata wanita itu telah dipacari sejak lama.

Tampaknya kejatuhan Gary Hart itu seperti suatu bentuk kemunafikan Amerika, karena bukankah di sana *free sex* dikenal luas? Tapi untuk memahaminya, mungkin kita harus melihat bagaimana

mereka membedakan antara suatu tindakan pribadi dan tindakan yang bisa mempengaruhi masyarakat luas karena dilakukan oleh seorang *public figure*. Yang pertama mungkin mereka tenggang, tapi yang, kedua sama sekali tidak, karena efek sosialnya yang meluas. Logikanya, jika kepada istrinya saja, Gary Hart berlaku curang, maka bagaimana kepada bangsa dan masyarakatnya?

Maka dalam hal etika sosial, negeri seperti Amerika Serikat disebut Gunnar Myrdal “negeri tegar” (*tough state*). Jepang, misalnya, adalah juga “negeri tegar”, tampak dari tradisi para pejabatnya yang mengundurkan diri (dulu malah harakiri) jika kedapatan dirinya atau bawahannya melanggar etika sosial. Korea Selatan, pelopor NIC’s (*Newly Industrializing Countries*) adalah “negeri tegar”, terlihat dari bagaimana mereka memberantas korupsi ke akar-akarnya, seperti yang kini terjadi terhadap diri bekas presiden mereka, Chun Doo Hwan.

Bagaimana dengan negara kita? Sudah amat terkenal bahwa Myrdal menggolongkan negara kita ke dalam, kelompok *soft states*, “negeri lunak”, yaitu dari segi etika sosialnya. Benar-tidaknya, tentu bukan soal gampang. Tapi, sepiantas lalu, boleh kita bayangkan, andaikan kriterium Amerika yang menimpa Gary Hart, atau kriterium Jepang yang melahirkan harakiri atau mundur dari jabatan, atau kriteria Korea Selatan yang membuat bekas presiden Chun memelas, itu semua diterapkan kepada negeri kita, barang kali bisa diperkirakan betapa runyamnya keadaan.

Kita memang menyadari bahwa kriterium negeri orang belum tentu cocok untuk negeri kita. Namun persoalan dasarnya sama, yaitu bahwa kejayaan bangsa bisa tegak hanya di atas landasan akhlak yang kukuh. Maka Nabi bersabda, “*Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan berbagai keluhuran akhlak (budi)*”. Sebab takwa yang inti agama itu memang seharusnya melakukan budi luhur. [❖]